

**Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Sumbawa Barat
2025-2029**

Visi

TERWUJUDNYA KSB MAJU LUAR BIASA MENUJU TRANSFORMASI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT SUMBAWA BARAT

Misi

1. KSB Maju dalam Infrastruktur Dasar, Konektivitas antar Wilayah dan Penunjang Perekonomian Daerah

Strategi

1. Meningkatkan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
2. Meningkatkan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
3. Meningkatkan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Meningkatkan Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
6. Meningkatkan Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan
7. Meningkatkan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
9. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan
11. Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan dalam Daerah Kabupaten/Kota
12. Meningkatkan Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Meningkatkan Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah
14. Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal
15. Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal
16. Meningkatkan Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan Lokal
17. Meningkatkan Penerbitan Izin Pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) Di Dalam DLKR/DLKP Pelabuhan Pengumpan Lokal
18. Meningkatkan Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Tempat Pendaratan dan Lepas Landas Helikopter
19. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi
20. Meningkatkan Penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan
21. Meningkatkan Penyusunan Dokumen Perencanaan Bidang Penerbangan
22. Meningkatkan Penyediaan Sarana dan Prasarana serta Pengelolaan Transportasi
23. Meningkatkan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
24. Meningkatkan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
25. Meningkatkan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
26. Meningkatkan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
27. Meningkatkan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
28. Meningkatkan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Kebijakan

1. Meningkatkan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota Meningkatkan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan
2. Meningkatkan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
3. Meningkatkan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Meningkatkan Registrasi Kendaraan Wajib Uji Berkala Kendaraan Bermotor Meningkatkan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor Meningkatkan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
4. Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota Meningkatkan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatkan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota Meningkatkan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
5. Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Persetujuan Teknis Andalalin Meningkatkan Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
6. Meningkatkan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal Meningkatkan Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Angkutan pada Terminal Tipe C Meningkatkan Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
7. Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
8. Meningkatkan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
9. Meningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
10. Meningkatkan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Kewenangan Kabupaten/Kota
11. Meningkatkan Fasilitas Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Meningkatkan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Kabupaten/Kota
12. Meningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Trayek Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota
13. Meningkatkan Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Meningkatkan Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan dalam Daerah Kabupaten/Kota Meningkatkan Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan Antar Daerah Kabupaten/Kota
14. Meningkatkan Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Meningkatkan Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Lokal Meningkatkan Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja

No	Tujuan		Sasaran		Indikator Kinerja	Satuan	Target Per Tahun				
							2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya layanan transportasi yang nyaman, aman dan terjangkau	1.1	Meningkatnya Pengelolaan Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	1.1.1	Persentase Pengelolaan Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Persentase (%)	65,68	67,67	70,18	71,78	74,23
		1.2	Meningkatnya Pengelolaan layanan transportasi laut	1.2.1	Rasio Konektivitas Laut	Skor	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
		1.3	Meningkatnya Pengelolaan Pengendalian Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	1.3.1	Persentase Pengendalian KKOP	Persentase (%)	0	0	100	100	100
		1.4	Meningkatnya kualitas penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah	1.4.1	Nilai Akip	Poin	71,21	72,53	73,40	73,89	74,34